

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Beberapa dekade penelitian tentang *civic engagement* dan mobilisasi gerakan sosial telah menghasilkan literatur yang kuat dan terperinci mengenai kapan, bagaimana, dan mengapa individu bergabung dengan organisasi, menghadiri demonstrasi, menjadi sukarelawan, atau terlibat dalam kehidupan warga negara lainnya (R. J. Dalton, 2013; Norris, 2002; Putnam, 2001). Terlepas dari tumbuhnya perhatian terhadap partisipasi dalam gerakan sosial dan *civic engagement*, penelitian tentang *civic engagement* telah berkembang secara pesat, menghilangkan pertimbangan sistematis terkait tumpang tindihnya substansial dalam kedua jenis partisipasi (Minkoff, 1997, hal. 610). Namun, Sangat disayangkan bahwa garis antara berbagai jenis keterlibatan menjadi lebih kabur dari waktu ke waktu.

Memahami pola keterlibatan menjadi hal yang penting, karena perdebatan sengit yang bermunculan tentang bagaimana individu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas warga negara. Robert D. Putnam (2000, hal. 185), misalnya, berpendapat bahwa keterlibatan warga negara telah menurun di Amerika Serikat, menimbulkan banyak penelitian tentang keadaan keterlibatan warga negara dalam masyarakat demokratis barat (Oberle, 2016; Stolle & Hooghe, 2005). Putnam cenderung melihat penurunan partisipasi sebagai sesuatu yang dapat membawa dampak negatif terhadap modal sosial dan masyarakat secara umum. Putnam menyoroti faktor-faktor seperti perubahan teknologi, perubahan ekonomi, urbanisasi, dan pengaruh media yang mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial tradisional (Putnam, 2001, hal. 201). Di sisi lain, tulisan Pasek et.al. lebih fokus pada peran positif penggunaan media, khususnya oleh generasi muda, dalam meningkatkan keterlibatan politik dan kemasyarakatan. Mereka menyoroti bahwa penggunaan media seperti internet, membaca buku, menonton berita televisi, mendengarkan radio berita, dan membaca majalah dapat membantu membangun jaringan sosial

yang mendukung keterlibatan politik dan kemasyarakatan (Pasek et al., 2006, hal. 125). Meskipun ada pengurangan pengetahuan dan kesempatan untuk bertindak, efek keseluruhan penggunaan media cenderung positif.

Putnam menyoroti penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial tradisional sebagai hasil dari perubahan teknologi dan pengaruh media, sementara Pasek et.al. berpendapat bahwa penggunaan media oleh generasi muda dapat meningkatkan keterlibatan politik dan kemasyarakatan. Namun, dalam perdebatan ini, perlu dipertanyakan apakah penggunaan media benar-benar menggantikan partisipasi dalam kegiatan sosial langsung. Selain itu, argumen Putnam tentang penurunan modal sosial dan dampaknya pada masalah sosial tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, perlu juga mempertimbangkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan media, sehingga dapat timbul kesenjangan partisipasi. Selain itu, meskipun Pasek et.al. menunjukkan bahwa penggunaan media dapat meningkatkan keterlibatan politik dan kemasyarakatan, masih perlu dipertanyakan sejauh mana partisipasi melalui media bersifat aktif dan berdampak nyata dalam perubahan sosial. Terdapat argumen bahwa penggunaan media sering kali hanya menciptakan *filter bubble* dan memperkuat pemisahan kelompok sosial yang sudah ada, daripada menghasilkan dialog dan pemahaman yang lebih luas (Pariser, 2012, hal. 60).

Perdebatan yang selalu hadir dalam penelitian terkait *civic engagement* yaitu berkaitan dengan bentuk partisipasi politik dan apolitis (Rafail & Freitas, 2017). Perbedaan ini mungkin paling terlihat dalam literatur empiris tentang partisipasi dalam keterlibatan warga negara dalam protes. Beberapa literatur tentang keterlibatan warga negara misalnya lebih memfokuskan pada partisipasi dalam komunitas apolitis, profesional, atau organisasi persaudaraan (Beyerlein & Hipp, 2006; Leroux, 2007). Perbedaan antara keterlibatan politik dan apolitis terkadang hadir dalam diskusi konseptual tentang kegiatan apa yang dianggap sebagai keterlibatan warga negara. Tipologi Joakim Ekman dan Erik Amnå (2012) secara eksplisit memperlakukan aktivisme sebagai bentuk keterlibatan yang terpisah, sementara keterlibatan warga negara dan mobilisasi politik serupa dalam sifat kolektif mereka terutama dibedakan oleh sifat politik yang lebih ke arah

apolitis. Beberapa peneliti berpendapat bahwa *civic engagement* telah diperluas dalam kajiannya, mencakup semua jenis aktivitas mulai dari pemungutan suara hingga bergabung dengan liga bowling (Adler, 2005).

Tabel 1. 1 Perbandingan *Civic engagement* dan Partisipasi dalam Protes

	<i>Civic Engagement</i>	Partisipasi dalam Protes
Karakteristik demografis	Laki-laki, status sosial ekonomi menengah atau tinggi, muda, kulit putih, bekerja (Verba, Sidney, Kay L. Schlozman, 1995)	Laki-laki, berstatus sosial ekonomi menengah atau tinggi, muda, berkulit putih, bekerja (McAdam & Paulsen, 1993)
Latar Belakang Pendidikan	Sekolah Menengah Atas (Egerton, 2002)	Sekolah Menengah Atas (Putnam, 2000b)
Status dalam keluarga	Menikah, sedikit atau tidak punya anak (Galston, 2001)	Lajang, sedikit atau tanpa anak (Corrigan-Brown, 2011)
Orientasi politik	Politik kiri dan kanan (Smith, 2013), efek politisasi partisipasi (Eliasoph, 2013)	Progresif atau kiri (Norris, 2002), meningkatkan penggunaan hak dari waktu ke waktu (Beyme, 2013)
Partisipasi keagamaan	Dampak positif (Levitt, 2008) atau selektif (Driskell et al., 2008).	Positif (Morris, 1986)(Morris 1986), selektif (Corrigan-Brown, 2011)
Lingkup kegiatan	Lokal, berorientasi komunitas (Putnam, 2000b)	Nasional (Minkoff, 1997) Transnasional (Tarrow, 2022)
Lintasan sementara	Partisipasi menurun (Putnam, 2001) atau lintasan yang tidak jelas (Stolle & Hooghe, 2005)	Meningkatkan partisipasi (Walker et al., 2008)(Meyer dan Tarrow 1998) atau lintasan yang tidak jelas (Soule & Earl, 2005)

Sumber: Peneliti (2023)

Keterlibatan warga negara dan partisipasi protes tumpang tindih secara substansial di beberapa dimensi utama, terutama dalam demografi dan latar belakang pendidikan individu yang terlibat didalamnya. Dalam kedua kasus tersebut, modal sosial dalam keterlibatan warga negara berasal dari latar belakang yang relatif istimewa yaitu mereka berkulit putih, kelas menengah atau atas,

memiliki setidaknya beberapa tingkat pendidikan menengah, bekerja, dan rata-rata dalam usia yang masih muda. Namun, kedua kelompok itu tidak identik. Mahasiswa sering memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam mobilisasi protes (Dyke, 2014; van Dyke, 1998; Van Dyke et al., 2007). Keterlibatan warga negara umumnya bersifat lokal, sedangkan protes lebih sering berfokus pada isu-isu nasional atau transnasional. Hal lain yang membedakan adalah bahwa individu yang terlibat dalam kehidupan warga negara lebih mungkin sudah menikah (Galston, 2001), sementara individu yang terlibat dalam protes lebih cenderung statusnya lajang (Corrigall-Brown, 2011). Terakhir, kedua jenis keterlibatan tersebut memiliki lintasan waktu yang berbeda dalam hal bagaimana tingkat partisipasi telah berubah, meskipun terdapat perdebatan dalam kedua literatur mengenai luas dan arah keterlibatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan teori bahwa protes telah menyebar ke berbagai kelompok politik, dan taktik tersebut memiliki daya tarik yang lebih luas bagi kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya tidak mengandalkan demonstrasi untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, yang digambarkan oleh David S. Meyer dan Sidney G. Tarrow (1998) sebagai munculnya masyarakat gerakan sosial. Hal ini mengemukakan beragam klaim yang telah menjadi subjek perdebatan sengit dengan temuan-temuan yang menerima dan menolak (Caren et al., 2011; Soule & Earl, 2005). Namun, sejumlah penelitian telah mengkonfirmasi bahwa demonstrasi merupakan komponen yang sering digunakan dalam keterlibatan politik di negara-negara demokratis barat, bahkan di negara-negara dengan tingkat demokratisasi dan perkembangan ekonomi yang lebih rendah (Norris, 2002).

Salah satu alasan utama untuk ekspansi protes adalah hasil dari institusionalisasi protes itu sendiri. Ketika protes menjadi lebih umum dan kurang kontroversial, hambatan partisipasi cenderung lebih rendah. Beberapa studi telah mengkonfirmasi bahwa taktik yang digunakan oleh gerakan sosial telah menjadi lebih lunak dari waktu ke waktu (McAdam et al., 2005; Sampson et al., 2005). Penelitian telah lama menunjukkan bahwa represi dapat menyebabkan ketidakberpartisipasian dalam mobilisasi gerakan sosial dan bahwa rasa takut

terhadap represi dapat meningkatkan keraguan individu untuk berpartisipasi (Moss, 2014), sedangkan taktik yang lebih konfrontatif dapat membatasi partisipasi kelompok sosial tertentu (Dodson, 2015).

Meskipun protes diklaim telah menyebar ke berbagai kelompok politik dan memiliki daya tarik yang lebih luas, perlu diingat bahwa tidak semua kelompok memiliki kesempatan dan sumber daya yang sama untuk berpartisipasi dalam protes. Faktor-faktor seperti aksesibilitas geografis, akses ke informasi, dan hambatan sosial atau ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan kelompok-kelompok tertentu untuk terlibat dalam protes. Selain itu, walaupun taktik protes telah menjadi lebih damai dari waktu ke waktu, masih ada situasi di mana protes dapat menghadapi tindakan represif dari pihak berwenang. Rasa takut terhadap represi atau hukuman dapat membatasi partisipasi individu dan mencegah kelompok-kelompok yang rentan untuk berpartisipasi dalam protes. Oleh karena itu, sementara protes telah meluas dan menjadi bentuk keterlibatan politik yang umum, perlu dicermati bahwa ada aspek-aspek yang dapat menghalangi partisipasi yang lebih inklusif dan adil dalam protes.

Sedangkan beberapa penelitian lainnya yang secara luas membahas tentang bagaimana generasi muda terlibat secara warga negara dan bagaimana jalur mereka berpartisipasi telah menarik dalam perhatian beberapa peneliti sosial (Beck & Jennings, 1982; Plutzer, 2002). Fisher (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa generasi muda yang berasal dari keluarga dengan tingkat status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih sering berbicara tentang politik, lebih sering memilih, dan lebih terlibat secara umum. Generasi muda dari latar belakang yang kurang beruntung kurang berpartisipasi dan kurang terlibat secara keseluruhan. Verba et al (1995) mungkin meringkas peran umum yang dimainkan status sosial ekonomi dalam keterlibatan politik untuk setiap jenis partisipasi, kemakmuran dan aktivitas berjalan beriringan.

Namun, hasil penelitian oleh Oesterle et.al., (2004) menunjukkan adanya kelanjutan dalam kegiatan sukarela seiring dengan peralihan generasi muda menuju dewasa. Mereka menemukan bahwa generasi muda yang terlibat dalam kegiatan sukarela pada masa muda mereka lebih cenderung melanjutkan kegiatan sukarela

di masa depan. Dalton (2008) juga menyatakan bahwa adanya kelanjutan dalam kegiatan sukarela dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda di berbagai jenis aktivitas kewarganegaraan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi awal generasi muda dapat mempengaruhi partisipasi politik mereka di masa depan.

Penelitian lain yang fokus pada peran kelompok sipil, termasuk asosiasi sukarela dan organisasi gerakan sosial, dalam partisipasi jangka panjang generasi muda. McFarland & Thomas (2006a) menemukan bahwa keterlibatan dalam kelompok-kelompok yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, perwakilan, berbicara di forum publik, dan membangun identitas komunitas memiliki efek yang lebih kuat terhadap partisipasi politik di masa depan dibandingkan dengan keterlibatan dalam jenis kelompok sukarela lainnya. O'Donoghue & Strobel (2007) menemukan bahwa organisasi pemuda berbasis komunitas dapat menjadi tempat yang kuat untuk aktivisme di kalangan generasi muda yang marginal.

Dalam perspektif gerakan sosial, beberapa peneliti menekankan pentingnya keterlibatan dalam gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial dalam membangun jaringan sosial dan memfasilitasi keterlibatan dan keterikatan jangka panjang generasi muda. Hagan & Hansford-Bowles (2005) menyimpulkan bahwa kontak yang berlanjut dengan mereka yang terlibat dalam pengalaman aktivisme penting untuk partisipasi jangka panjang generasi muda. Namun, temuan oleh Fisher & McInerney (2012) menunjukkan bahwa para canvasser yang memiliki hubungan sosial sebelumnya cenderung terlibat dalam organisasi sipil dan politik lainnya di masa mendatang. Perbedaan temuan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jenis aktivisme yang diteliti serta perubahan yang lebih luas dalam aktivisme di Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini mencerminkan pergeseran profesionalisasi dan institusionalisasi yang mengubah peran gerakan sosial menjadi instrumen dalam politik konvensional.

Meskipun terdapat perbedaan dalam jenis partisipasi yang dihasilkan oleh aktivisme awal, terdapat konsensus dalam penelitian ini bahwa partisipasi politik dalam aktivisme dan hubungan sosial yang terjalin melalui keterlibatan tersebut berkontribusi pada tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi di masa depan.

Perdebatan yang menarik adalah sejauh mana faktor-faktor kontekstual dan individual dapat mempengaruhi partisipasi politik generasi muda. Sementara faktor seperti status sosial ekonomi, kelanjutan dalam kegiatan sukarela, dan keterlibatan dalam kelompok sipil dan gerakan sosial memiliki dampak yang signifikan, masih ada variabel lain seperti pendidikan politik, lingkungan sosial, dan perubahan sosial yang perlu dipertimbangkan.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa partisipasi bergeser bukannya menurun (Hustinx et al., 2012). Dalam pandangan ini, ukuran modal sosial Putnam menunjukkan penurunan dalam aktivitas tertentu, tetapi penurunan tersebut merupakan akibat dari lanskap organisasi yang semakin padat yang menghasilkan persaingan dalam partisipasi. Kompetisi ini menyebabkan partisipasi sipil bergeser ke arena seperti menjadi sukarelawan. Sebagai hasil dari pergeseran partisipasi sipil ini, proses keterlibatan warga negara sedang diperbarui dan diperluas, bukan dikurangi (Gaby, 2016). Tren akan partisipasi warga negara bervariasi tergantung pada bentuk keterlibatan warga negara yang diteliti (Paxton, 1999). Misalnya, generasi muda mengkampanyekan partisipasi politik untuk menjadi sukarelawan (Zukin et al., 2006a). Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan kesukarelaan dan *volunteersm* daripada keterlibatan politik (Zukin et al., 2006b) atau sebagai akibat dari perubahan peluang partisipasi warga negara yang baru-baru ini mulai bertransformasi. Penataan kembali kewarganegaraan juga kemungkinan membentuk siapa yang berpartisipasi, termasuk partisipasi diferensial oleh kelompok sosiodemografi.

Selain itu, partisipasi masyarakat secara positif memengaruhi generasi muda, menyediakan cara untuk membangun jejaring dan modal sosial (Flanagan & Levine, 2010), membentuk pemahaman untuk partisipasi sosial mereka di masa dewasa nanti (Finlay et al., 2010). Selain itu, partisipasi masyarakat di awal kehidupan sangat memprediksi partisipasi orang dewasa (McFarland & Thomas, 2006b). Kemudian beberapa ahli membedakan antara partisipasi konvensional dan non-konvensional, seperti gerakan sosial (Youniss et al., 2002). Meskipun gerakan sosial dapat menggunakan pendekatan politik “konvensional” (misalnya, sumbangan kampanye), repertoar taktis yang membedakan bentuk partisipasi ini

terdiri dari perilaku seperti “rapat umum, demonstrasi, pawai, dan bahkan taktik pembangkangan warga negara” (Meyer, 2007). Sedangkan partisipasi non-konvensional seperti keterlibatan warga negara dalam dunia digital masih kurang mendapatkan perhatian dari beberapa peneliti, padahal ditengah kemajuan dunia internet, nampaknya menjadi sangat penting untuk meneliti bagaimana pola keterlibatan warga negara muda dalam dunia digital sehingga dapat merubah konsep dari *civic engagement* yang dikenal selama ini.

Perlu dicermati bahwa pergeseran partisipasi sebagai hasil persaingan dan perubahan lanskap organisasi, serta peran teknologi dalam membentuk cara partisipasi generasi muda. Meskipun pergeseran tersebut menunjukkan adanya kontinuitas partisipasi dan pengaruh positif partisipasi dalam masyarakat, kita juga harus memperhatikan keterbatasan dan implikasi dari pergeseran partisipasi tersebut. Selain itu, penting untuk terus mengeksplorasi dan memahami pola partisipasi generasi muda dalam dunia digital untuk menggali dampaknya terhadap keterlibatan politik dan sosial secara keseluruhan.

Lantas bagaimana dengan *civic engagement* di Indonesia ? Dibandingkan dengan negara demokrasi baru lainnya, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menikmati tingkat *civic engagement* yang luar biasa tinggi seperti yang terlihat dari partisipasi populer dalam kehidupan asosiasi (Lussier & Fish, 2012a). Menurut Survei Barometer Asia, sekitar 84 persen orang Indonesia menjadi anggota setidaknya satu organisasi dibandingkan dengan 61 persen di Malaysia dan 51 persen di Thailand (Lussier & Fish, 2012a). Menurut survei yang sama, organisasi yang paling populer adalah asosiasi perumahan dan komunitas, kelompok agama, dan serikat pekerja. Selain itu, *civic engagement*, termasuk partisipasi dalam asosiasi perumahan dan komunitas, mencakup partisipasi yang formal di tingkat komunitas dalam program pembangunan partisipatif yang diprakarsai oleh negara dan swasta.

Kontribusi baru-baru ini untuk diskusi tentang keterlibatan warga negara dan demokrasi di Indonesia dibangun, antara lain, studi Almond dan Verba tentang budaya warga negara di negara demokrasi barat (Almond et al., 1990; Green & Schwam-Baird, 2016). Bahwa tingkat keterlibatan warga negara yang tinggi dalam

asosiasi memperkuat dan mempertahankan demokrasi dengan membangun budaya warga negara itu sendiri dalam komunitasnya. Mengenai Indonesia, Lussier dan Fish (Lussier & Fish, 2012b) berpendapat bahwa tingginya tingkat keanggotaan asosiasi di Indonesia memperkuat demokrasi dalam tiga cara khusus. Pertama, dengan menumbuhkan pemahaman di antara individu di tingkat lokal yang membangun persepsi bahwa individu tersebut dapat mempengaruhi perubahan di tingkat politik yang lebih tinggi. Kedua, dengan mengembangkan keterampilan warga negara yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik secara lebih efektif. Ketiga, dengan menyediakan jalan untuk rekrutmen politik yang lebih formal (Lussier & Fish, 2012a). Argumen ini juga dapat diperluas ke protes yang lebih informal dan *ad hoc* yang umumnya terkait dengan demonstrasi mahasiswa dan protes pro-kaum miskin di seluruh Indonesia (Lussier & Fish, 2012b).

Literatur tentang pembangunan partisipatif membuat asumsi serupa mengenai pengaruh keterlibatan rakyat dan warga negara terhadap demokrasi. Misalnya, laporan Bank Dunia mencatat bahwa partisipasi penduduk desa dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan menyediakan arena bagi pemerintahan demokratis dari bawah ke atas (Guggenheim, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan tingginya partisipasi masyarakat awam dalam perhimpunan *local*/daerah tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi juga merupakan determinan sentral bagi pembangunan institusi demokrasi dan konsolidasi demokrasi jangka panjang. Menantang fokus teknokratis dan *top-down* dalam pekerjaan pembangunan, ide-ide Putnam tentang modal sosial menjadi alat yang berguna untuk mengalihkan perhatian terhadap masyarakat dan komunitas, dan untuk berpikir tentang pembangunan institusi demokrasi dari bawah ke atas (Putnam, 1995a). Secara khusus, hubungan antara modal sosial dan demokrasi adalah kehadiran asosiasi warga negara yang kuat di tingkat lokal/daerah yang memupuk kepercayaan dan menumbuhkan kapasitas masyarakat biasa untuk terlibat secara politik. Keterlibatan masyarakat di tingkat lokal/daerah dengan demikian akan memungkinkan terciptanya jaringan kepercayaan dan kerja sama yang memperkuat modal sosial masyarakat secara

keseluruhan, dengan demikian, menciptakan hubungan yang diperlukan antara orang-orang dalam masyarakat warga negara dan orang-orang yang bekerja di pemerintahan (Putnam, 1995b).

Fokus pada hubungan antara keterlibatan warga negara dan demokrasi sebagai indikator berkembangnya demokrasi yang terlihat dalam literatur umum dan khusus konteks tentang demokrasi, sangat kontras dengan kritik ilmiah terhadap kekurangan demokrasi Indonesia sejak transisi demokrasi pada tahun 1998. Hal ini mengejutkan bahwa terlepas dari tingkat keterlibatan warga negara yang tinggi, sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk menilai perannya dalam proses demokratisasi. Sebaliknya, penelitian tentang demokrasi di Indonesia difokuskan pada cara kerja lembaga demokrasi formal, khususnya pada pemilu dan mobilisasi pemilu di tingkat nasional dan lokal/daerah, peran elit politik, lembaga negara, partai politik, dan warga negara. Misalnya, penelitian tentang institusi demokrasi telah menyoroti keterbatasan struktural dan institusional dari institusi inti negara (Aspinall & Mas'Udi, 2017; Mietzner, 2007; Order & Studies, 2008). Literatur tentang politik lokal/daerah dan reformasi desentralisasi telah menunjukkan kompleksitas kekuasaan, politik, dan bisnis dalam politik tingkat lokal. Secara khusus, peran elit lokal dan munculnya preman politik dalam menghambat dan membentuk demokrasi di tingkat lokal tidak hanya membatasi kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi telah menciptakan sebuah sistem di mana jaringan personalisasi dan patrimonial menjadi hal yang menentukan dalam pemilu daerah terutama tentang bagaimana cara kerja parlemen lokal (DPRD) (Hadiz, 2010; Schulte Nordholt & van Klinken, 2007).

Generasi muda dipandang memimpin dalam partisipasi politik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baru. Sebagai pengadopsi awal teknologi ini, generasi muda Amerika dianggap sebagai “penerima manfaat kemajuan teknologi” (Garcia-Castañon et al., 2011). Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi efek dari apa yang disebut “Tsunami teknologi” pada politik dan masyarakat secara lebih umum (Winograd M, 2008). Teknologi ini termasuk perangkat genggam nirkabel, internet, dan media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook*, yang semuanya dikenal sebagai Web 2.0 (Chadwick, 2011). Teknologi

kolektif Web 2.0 menghubungkan orang dengan cara baru dan inovatif (Maurer, 2015; Wang & Wellman, 2010). Meskipun banyak dari penelitian ini tidak terfokus terutama pada generasi muda, sebagian besar peneliti cenderung setuju dengan Kann yang menemukan bahwa Web 2.0 “memiliki potensi untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kehidupan publik (Kann et al., 2007).

Sehubungan dengan keterlibatan politik, perhatian telah difokuskan secara khusus pada hubungan antara Web 2.0 dan partisipasi politik, mobilisasi, dan kampanye politik secara luas (Anduiza et al., 2009; McAdam & Tarrow, 2010). Berbicara tentang kekuatan dan kerentanan jaringan politik, banyak peneliti telah berfokus pada bagaimana teknologi memungkinkan dan mempromosikan berbagai bentuk keterlibatan (Lance Bennett, 2004; Shah et al., 2005). Meskipun dalam beberapa penelitian telah mengeksplorasi bagaimana komunikasi yang dimediasi komputer mempengaruhi kontak tatap muka, konsensus umum telah muncul bahwa, alih-alih menggantikan kontak pribadi, teknologi ini justru melengkapinya. Salah satu kesimpulan umum dari beberapa penelitian, bahwa perubahan ini membuat aksi politik “lebih mudah, lebih cepat dan lebih universal” (Aelst & Walgrave, 2002). Dalam percobaan lapangan tentang peran pesan teks dalam memobilisasi pemilih terdaftar untuk hadir pada hari pemilihan, misalnya, Dale & Strauss (2009) menemukan bahwa pengingat pesan teks menaikkan tingkat partisipasi sebanyak 3% (Dale & Strauss, 2009).

James Carey berpendapat bahwa konsekuensi utama dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah peningkatan keterlibatan sosial berdasarkan usia dimana usia muda banyak terlibat dalam bidang sosial melalui teknologi informasi dan komunikasi (Xenos, 2022). Dengan hal seperti itu, Carey menggunakan gagasan Harold Adams Innis yang menyatakan bahwa fitur utama media elektronik adalah bias spasialnya, yang berarti bahwa mereka cenderung mempengaruhi masyarakat dengan menghilangkan ruang dan jarak fisik, dibandingkan dengan media komunikasi lain seperti media pada era zaman batu kuno. Carey memperkirakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di masa depan akan semakin mengikis perbedaan yang terjadi dalam budaya dan

wilayah dibandingkan dengan kemajuan dalam bahasa, nilai, simbol dan makna (Carey, 1967).

Dengan perluasan internet, orang sekarang memiliki banyak sumber untuk mengumpulkan informasi. Hal ini menyebabkan dua masalah utama: pertama, Pengguna cenderung mencari informasi yang menegaskan keyakinan, sikap, atau minat mereka pada informasi (pendukung) yang tersedia. dan kedua, layanan internet, seperti situs jejaring sosial dan pencarian mesin yang menggunakan algoritma untuk menyajikan semakin banyak informasi pendukung yang menarik pengguna (P. M. Dahlgren, 2021). Kedua proses ini dapat saling memperkuat sehingga orang tidak lagi berhubungan dengan informasi yang menantang keyakinan, sikap, atau kepentingan. Sebaliknya, seorang individu menjadi terisolasi dalam *filter bubble*: “ekosistem informasi pribadi yang telah dilayani oleh algoritma ini untuk siapa mereka pikir” (Dish, 2010) atau "alam semesta yang unik” (Pariser, 2012).

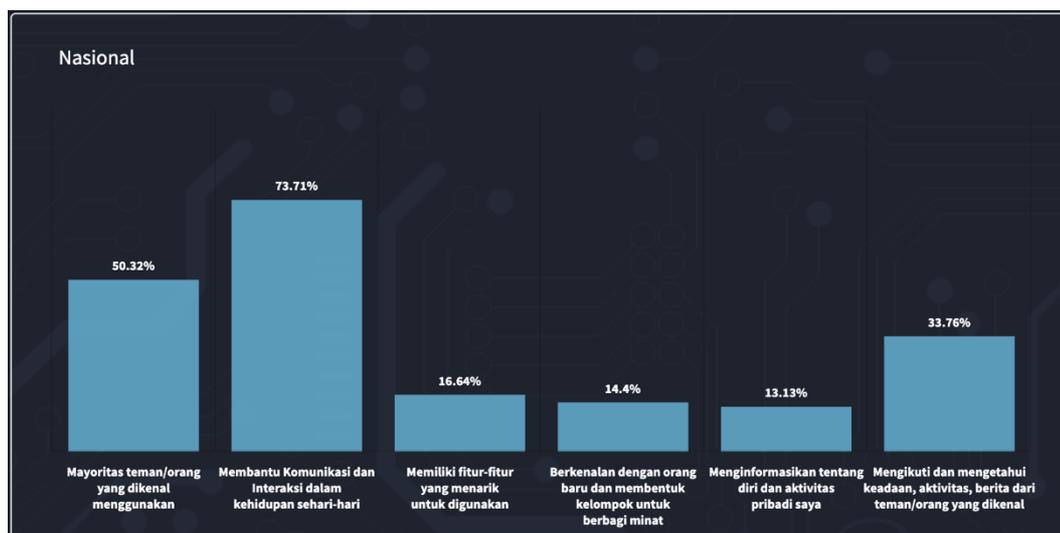
Dewasa ini budaya membaca dan menulis telah berevolusi menjadi komunikasi digital. “Bahwa perubahan transformasi budaya ini terjadi melalui proses *digitally* (perubahan media menjadi digital), *interactivity* (perubahan media digital yang dapat memberi respons interaktif pada sesama pengguna), dan *dispersal* (proses distribusi produksi dan pesan dalam media digital untuk melibatkan keaktifan individu” McLuhan (1990).

Berdasarkan data dari “*We Are Social*” tentang pengguna telepon seluler, internet dan media sosial pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin banyak. Pengguna internet pada tahun 2021 sebanyak 202, 6 Juta orang Indonesia telah menggunakan internet untuk aktifitas sehari-hari atau sekitar 73,7 % (Kemp, 2022). Penduduk Indonesia telah terbiasa berinteraksi dengan internet terlebih saat pandemi covid-19 mau tidak mau internet dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer saat ini. Bandingkan dengan pengguna internet pada tahun 2020 yang mencapai 175, 4 jiwa pengguna internet dengan demikian pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 27, 2 juta orang. Selain itu pengguna media sosial di Indonesia juga mengalami kenaikan pada 2021 dimana

170 juta jiwa penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial dalam aktifitas mereka sehari-hari. Kita bandingkan dengan pengguna media sosial pada tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 160 juta penduduk sebagai pengguna, dengan demikian maka terjadi peningkatan sebesar 10 Juta pengguna media sosial di Indonesia (Kemp, 2022). Hal ini bisa menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk memperlihatkan eksistensinya dalam dunia digital sehingga setiap konten yang dikeluarkan oleh orang Indonesia banyak yang trending di beberapa *platform* media sosial.

Selain itu netizen di Indonesia terkenal dengan netizen yang bisa menggerakkan opini yang terdapat dalam media sosial. Bahkan perusahaan besar seperti Microsoft menutup kolom komentarnya karena banyak diserang oleh netizen Indonesia, hal ini dikarenakan hasil rilis “Microsoft *Digital Civility Index* (DCI) 2021, yang dirilis 26 Februari 2021, membuat gerah warganet Indonesia yang dinyatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Warganet atau para pengguna media sosial Indonesia pun ramai-ramai membanjiri mulai Twitter dan Instagram. Hingga Jumat 26 Februari 2021, pukul 14.30, terdapat lebih dari 59.000 tweet terkait Microsoft ini. Laporan DCI dari Microsoft, yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dari seluruh dunia mendapatkan hasil survei yang diikuti 16.000 responden dari 32 wilayah, dan 503 orang responden berasal dari Indonesia” (Riyanto, 2021).

Dari kasus cuitan netizen tersebut dapat terlihat begitu aktifnya pengguna internet di Indonesia dalam menanggapi berbagai isu yang muncul dalam media sosial, maka tak ayal kekuatan netizen tersebut bisa menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia saat ini apabila dihubungkan dengan proses partisipasi warga negara dalam dunia maya. Akan tetapi, yang menjadi sebuah permasalahan adalah tentang etika netizen yang seakan-akan mereka bebas berkomentar apapun tanpa adanya koridor pembatasan dalam mengemukakan pendapat di dunia maya. Akan tetapi, sangat disayangkan penelitian tentang bagaimana keterlibatan netizen warga negara yang berhubungan dengan literasi digital masih belum ditemukan dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan *civic engagement*.



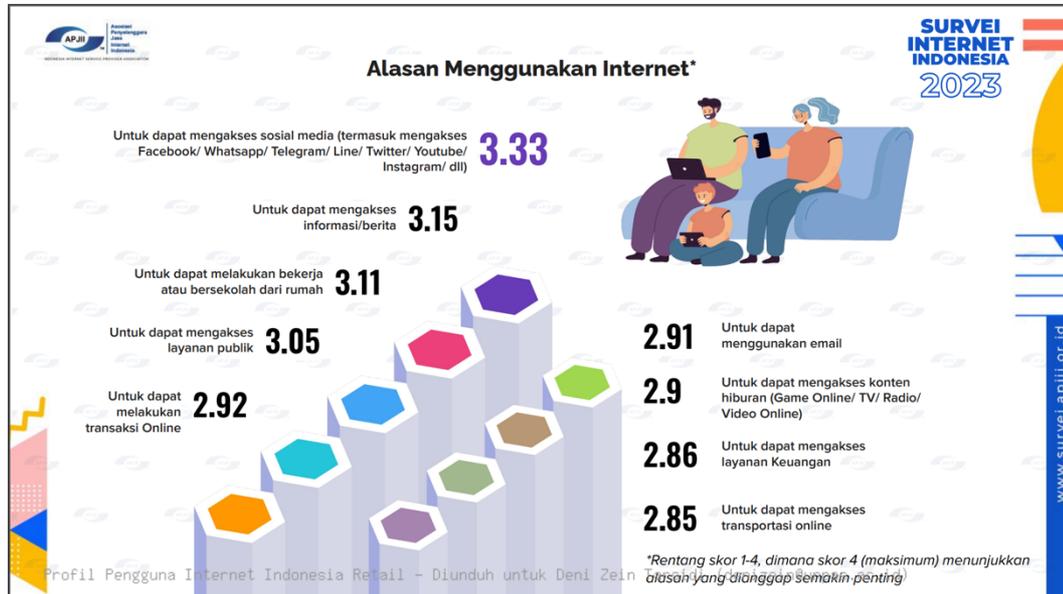
Gambar 1. 1 Alasan Bermedia Sosial

Sumber: (Katadata Insight Center dan Kominfo, 2022)

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Katadata Insight Center dan Kominfo, alasan penggunaan media sosial di Indonesia yang paling banyak adalah terkait dengan membantu komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Analisis data ini mengindikasikan bahwa media sosial telah menjadi platform yang penting dalam memfasilitasi interaksi sosial dan pertukaran informasi di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam konteks literasi digital, pemahaman dan keterampilan untuk menggunakan media sosial dengan bijak menjadi krusial agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam ranah digital, termasuk dalam hal *civic engagement*. Media sosial telah membuka peluang baru untuk *civic engagement*, di mana individu dapat terlibat dalam isu-isu sosial dan politik, berbagi pandangan mereka, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang mendukung masyarakat dan negara. Namun, untuk berpartisipasi secara efektif, digital natives perlu memahami bagaimana memanfaatkan platform tersebut dengan benar, memahami dampak dari informasi yang mereka sebar, serta membedakan antara berita dan opini.

Analisis data alasan penggunaan media sosial juga dapat mencakup identifikasi dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dalam konteks *civic engagement*. Dampak positif mungkin melibatkan peningkatan kesadaran terhadap isu-isu sosial, peningkatan partisipasi dalam kampanye sosial, dan akses

lebih mudah ke informasi publik. Namun, terdapat juga risiko seperti penyebaran informasi palsu, *echo chamber*, dan polarisasi pandangan.



Gambar 1. 2 Alasan Menggunakan Internet

Sumber: (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023)

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, alasan paling umum bagi penggunaan internet di Indonesia adalah untuk mengakses media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Line, Twitter, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Analisis data ini mencerminkan betapa dominannya peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Penggunaan media sosial sebagai alasan utama mengakses internet memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara digital natives berinteraksi, berpartisipasi dalam ranah publik, dan terlibat dalam isu-isu sosial dan politik. Data menunjukkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa *platform* ini bukan hanya tempat untuk berbagi informasi, tetapi juga menjadi tempat berinteraksi, bertukar pikiran, dan mengakses informasi tentang berbagai hal.

Keterhubungan yang diberikan oleh media sosial memungkinkan individu untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas mereka, terlepas dari jarak fisik. Ini juga mengarah pada akses mudah terhadap berbagai informasi dan perkembangan terbaru di berbagai bidang. Keterlibatan dalam media sosial dapat

Deni Zein Tarsidi, 2023

Penguatan Civic Engagement Melalui Literasi Digital Bagi Digital Natives

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berdampak pada partisipasi *civic engagement*. Jika *digital natives* dapat membawa kesadaran atas isu-isu sosial dan politik melalui platform ini, mereka dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung perubahan positif dalam masyarakat.

Fisher & Boekkooi (2010) melihat lebih spesifik pada perbedaan antara orang-orang yang dimobilisasi melalui internet dan mereka yang dimobilisasi melalui teman, keluarga, rekan kerja, dan organisasi di jejaring sosial mereka. Meskipun saat ini sedikit yang diketahui tentang bagaimana memobilisasi melalui internet dapat berpengaruh terhadap partisipasi dalam gerakan sosial terkait dengan keterlibatan tatap muka (langsung). Beberapa temuan dalam penelitian menyebutkan bahwa biaya penjangkauan *online* yang terbatas, banyak kelompok-termasuk organisasi sukarela, partai politik, dan aktor gerakan sosial yang telah memanfaatkan teknologi ini untuk memobilisasi dukungan dalam segala jenis kampanye politik. Teknologi komunikasi Web 2.0 menyediakan cara yang relatif murah untuk mendistribusikan pengumuman dan informasi politik kepada siapa pun yang memiliki akun email, Twitter, atau Facebook atau akses ke *World Wide Web* (Gulati & Williams, 2013).

Paradigma remaja yang terlibat secara implisit menekankan perubahan generasi dalam identitas sosial yang mengakibatkan semakin pentingnya jaringan teman sebaya dan komunitas *online* (Bennett, 2008). Dalam pandangan ini, jika ada penurunan kredibilitas atau keaslian banyak lembaga publik dan wacana yang mendefinisikan kehidupan politik konvensional, kesalahan lebih terletak pada kinerja pemerintah dan narasi berita daripada warga negara yang tidak dapat terlibat dengan mereka (Bimber et al., 2005). Dalam arti penting, paradigma ini menekankan pada pemberdayaan pemuda sebagai individu yang ekspresif dan secara simbolis membebaskan kaum muda untuk membuat pilihan kreatifnya sendiri. Dalam tawar-menawar, paradigma pemuda yang terlibat juga memudahkan tugas utama untuk berpartisipasi dalam kegiatan konvensional yang berpusat pada pemerintah.

Dalam banyak kasus, peneliti di sekolah ini hanya samar-samar menyadari tentang penurunan dan defisit dalam partisipasi politik yang lebih konvensional di

kalangan warga negara muda (Montgomery et al., 2004). Akibatnya, paradigma pemuda yang terlibat membuka pintu ke spektrum baru tindakan warga negara di arena *online* dari *MySpace* hingga *World of Warcraft*. Sebaliknya, paradigma pemuda yang tidak terlibat mungkin mengakui munculnya bentuk ekspresi publik yang lebih otonom seperti politik konsumen, atau protes sesekali di *MySpace*, sambil tetap fokus pada penurunan generasi dalam hubungan dengan pemerintah dan lingkungan sosialnya (Ferman, 2012). Keterlibatan warga negara (misalnya, mengikuti urusan publik dalam berita) sebagai ancaman bagi kesehatan demokrasi itu sendiri (Bennett, 2008).

Apabila seseorang sering mengakses internet dan menjadikan internet sebagai kebutuhan primer mereka maka dapat dikatakan mereka sebagai *digital native*. Seiring penggunaan internet generasi muda membentuk pengalaman pendidikan, pekerjaan, dan hubungan pribadi mereka yang para peneliti sosial sebut sebagai *digital natives* dimana mereka selalu berada dalam posisi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sebuah jalan untuk melakukan berbagai aktifitas yang lebih mengutamakan dunia digital (Smith et al, 2012). Beberapa peneliti sosial telah menemukan kebijakan secara teratur dimana generasi muda sebagai pengguna internet telah dapat mengkonseptualisasikan pengguna internet dari kelompok homogen yang mampu mengintegrasikan media baru ke dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Klaim tersebut yang menjadikan mereka sebagai *digital natives* (Prezsky, 2001), atau bisa juga disebut mereka sebagai anggota dari “*Net Generation*” (Books et al., 2009), yang sangat kontras dengan orang tua mereka yang tidak menjadikan internet sebagai kebutuhan primer mereka. Peluang tersebut mengubah kehidupan sosial di sejumlah domain, termasuk pendidikan, pekerjaan, keterlibatan warga negara dalam kaitannya dengan politik dimana interaksi dan hubungan sosial mereka merubah struktur yang konservatif menuju pola interaksi yang lebih maju dibandingkan dengan generasi yang tidak terbiasa menggunakan internet sebagai media untuk berinteraksi satu sama lain. Terdapat beerbagai perdebatan yang berpusat pada bagaimana penggunaan internet mempengaruhi interaksi sosial, beberapa peneliti berpendapat bahwa generasi muda atau dalam hal ini dapat

dikatakan sebagai *digital native* akan membuat mereka lebih baik daripada generasi sebelumnya yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari (Palfrey & Gasser, 2008).

Kapasitas yang dikembangkan *digital native* untuk penggunaan internet mencerminkan keterlibatan mereka yang beragam dan berkelanjutan dengan media sosial. Beberapa peneliti menggolongkan hal ini dengan kualitas dan konteks akses internet *digital native* yang berhubungan dengan frekuensi, durasi, motivasi dan tujuan penggunaannya, serta persepsi mereka tentang dampak penggunaan internet. Beberapa peneliti sosial menemukan disparitas dalam faktor-faktor ini sebagai indikasi proses stratifikasi sosial yang lebih luas (Hargittai & Hinnant, 2008). Sementara beberapa peneliti sosial yang lain menekankan lembaga yang digunakan *digital native* untuk menyesuaikan penggunaan internet agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menghindari risiko disasosiatif (Livingstone & Helsper, 2007).

Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa setiap harinya, 79% waktunya *digital native* dihabiskan untuk mengakses internet. Hal tersebut menunjukkan bahwa *digital native* menjadikan internet menjadi sebuah kebutuhan primer dimana mereka mungkin tidak bisa hidup tanpa adanya akses internet. Bisa kita bayangkan ketika bangun tidur para *digital native* yang pertama kali dia lakukan adalah membuka telepon selulernya bahkan sebelum tidur pun menjadi sebuah ritual untuk membuka telepon selulernya. “Komunikasi teknologi tidak bisa dibicarakan tanpa menyebut media sosial. Maka media sosial bagi *digital native* merupakan sebuah sarana untuk mengeksplorasi dunia dan dirinya agar menjadi pribadi yang terbuka terhadap setiap perkembangan yang terjadi, bukan hanya dalam dunia hiburan saja tapi juga dalam dunia politik. Hal tersebut menjadikan media sosial sebagai salah sarana pendidikan politik yang efektif bagi *digital native*, dimana mereka dalam berpartisipasi secara aktif dalam ruang-ruang publik yang tercipta dalam media sosial tersebut. Selain itu, media sosial dapat menumbuhkan berpikir kritis terhadap isu-isu yang hangat diperbincangkan bagi penggunanya. Dahlberg (2011) “wacana publik yang rasional menghasilkan pengetahuan demokratis”. Maka isu yang menjadi wacana dalam media sosial sebisa mungkin harus dapat mengsilkan

pengetahuan demokratis agar dapat terciptanya praktik berpolitik yang rasional partisipatif.

Mengingat perkembangan teknologi digital yang cepat dan terus-menerus, individu dituntut untuk menggunakan berbagai keterampilan teknis, kognitif, dan sosiologis yang terus berkembang untuk melakukan tugas dan memecahkan masalah di lingkungan digital. Keterampilan ini disebut dalam literatur sebagai “literasi digital” (Gilster, 1997a; Inoue et al., 1997). Seperti istilah modis lainnya, “literasi digital” telah menikmati berbagai kegunaan dalam literatur, dari referensi ke aspek teknis (Eshet-Alkalai, 2004; Lanzenberger, 2003) untuk makna kognitif, psikologis, atau sosiologis (Egnatoff, 1999; Gilster, 1997a; Tapscott, 2009). Penggunaan istilah yang tidak jelas menyebabkan ambiguitas, dan menyebabkan kesalahpahaman, dan komunikasi yang buruk di antara peneliti dan pengembang yang terlibat dalam proses merancang dan mengembangkan lingkungan digital pembelajaran (Özdemir, 2008). Pengembangan kerangka kerja konseptual yang lebih jelas dapat meningkatkan pemahaman keterampilan yang dicakup oleh istilah “literasi digital”, dan memberikan panduan yang lebih tepat bagi perancang lingkungan digital untuk perencanaan yang efektif dari lingkungan kerja digital yang berorientasi pada pelajar (Amichai-Hamburger, 2002). Dari pemaparan di atas maka di era digital seperti saat ini, menjadi sangat penting bagaimana mengkaji literasi digital yang dapat memperkuat *civic engagement* dari warga negara muda atau *digital natives* agar mereka menjadi warga negara yang baik di era digital seperti saat ini.

Bidang penelitian penting yang belum banyak diikaji menyangkut peran teknologi internet tidak hanya sebagai bentuk partisipasi tetapi juga sebagai jembatan antara berbagai jenis keterlibatan. Menciptakan pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana partisipasi didefinisikan dan dilaksanakan dalam praktik akan sangat membantu dalam memperhitungkan perbedaan tingkat individu dalam keterlibatan. Penelitian sebelumnya telah menemukan, misalnya, bahwa usia (Gauthier, 2003), intensitas partisipasi (McAdam, 1990), atau area dalam keterlibatan lainnya yang tidak menggunakan teknologi internet (Leroux, 2007) dapat secara langsung memengaruhi batasan antara aktivitas individu.

Penelitian tentang literasi digital banyak ditemukan di bidang pendidikan akan tetapi sulit untuk menemukannya dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal, literasi digital memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang cerdas dan kritis dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Salah satu tantangan yang semakin meruncingnya penyebaran informasi *hoax* yang dapat menghambat proses partisipasi di era digital. *Hoax* memiliki sifat yang menyesatkan, disengaja, dan manipulatif dengan tujuan mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan individu (Allcott & Gentzkow, 2017; Lewandowsky et al., 2017). *Hoaks* sering kali menghindari fakta yang bertentangan, menciptakan kesan konsensus palsu, atau menggunakan teori konspirasi untuk memanipulasi pikiran dan keyakinan individu (Pennycook et al., 2020).

Hoaks juga dapat memperkuat polarisasi, menggugah ketakutan, atau menciptakan kebingungan dalam masyarakat, sehingga meragukan institusi dan media yang berpengaruh (Lewandowsky et al., 2017; Pennycook et al., 2020). Dalam perdebatan antar teori *hoax*, terdapat perselisihan pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran *hoaks*, dengan penekanan pada faktor individu dan faktor sosial-politik. Pendekatan literasi digital menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan kritis individu dalam mengenali dan mengevaluasi informasi *online*. Namun, teori *hoax* menunjukkan bahwa penyebaran *hoaks* tidak hanya terkait dengan kurangnya literasi digital individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas.

Literasi digital harus fokus pada dampak terhadap kewarganegaraan melalui media digital yang dapat mempengaruhi isu-isu politik, sosial, dan budaya dan isu-isu demokrasi (Mihailidis, 2018; Mihailidis & Viotty, 2017). Literasi digital sangat penting bagi warga negara yang baik untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul dari kemajuan teknologi informasi. Millner (2002) menegaskan bahwa keterampilan literasi digital merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam literasi kewarganegaraan untuk menghadapi penyebaran berita *hoax*. Maka dengan penelitian ini dapat mengisi kekosongan penelitian yang berkaitan dengan

penguatan *civic engagement* melalui literasi digital terutama bagi *digital natives* sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, secara umum dapat dirumuskan masalah penelitian Bagaimana penguatan *Civic engagement* melalui Literasi Digital Bagi *Digital Nativess* ? Sementara itu secara khusus rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan *Digital Nativess* untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi konten informasi dalam media sosial sebagai penguatan *Civic Engagement* ?
2. Bagaimana penguatan *civic engagement* melalui integrasi literasi informasi dan literasi data sebagai bagian dari literasi digital bagi *digital natives*?
3. Bagaimana penguatan *civic engagement* dalam perspektif utopia dan distopia tanpa literasi digital?
4. Bagaimana praktik kewarganegaraan digital dalam memperkuat *civic engagement* melalui literasi digital bagi *digital natives*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian untuk menganalisis penguatan *civic engagement* melalui literasi digital bagi *digital natives* yang pada akhirnya dapat digunakan oleh para pengguna, pemerhati dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan literasi digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diungkap di atas maka secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut di bawah ini:

1. Menganalisis kemampuan *digital nativess* untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi konten informasi dalam media sosial sebagai penguatan *civic engagement* ?

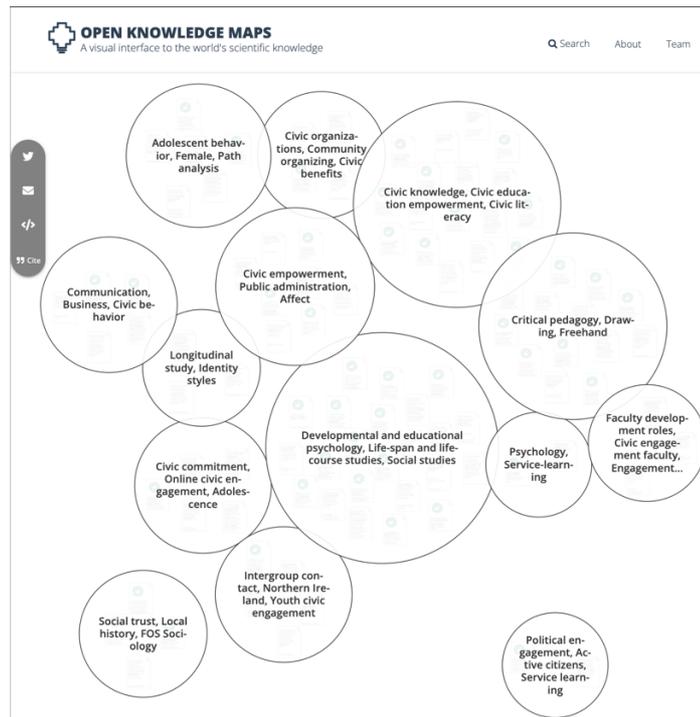
2. Menganalisis penguatan *civic engagement* melalui integrasi literasi informasi dan literasi data sebagai bagian dari literasi digital bagi *digital natives*?
3. Menganalisis penguatan *civic engagement* dalam perspektif utopia dan distopia tanpa literasi digital?
4. Menganalisis praktik kewarganegaraan digital dalam memperkuat *civic engagement* melalui literasi digital bagi *digital natives*?

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

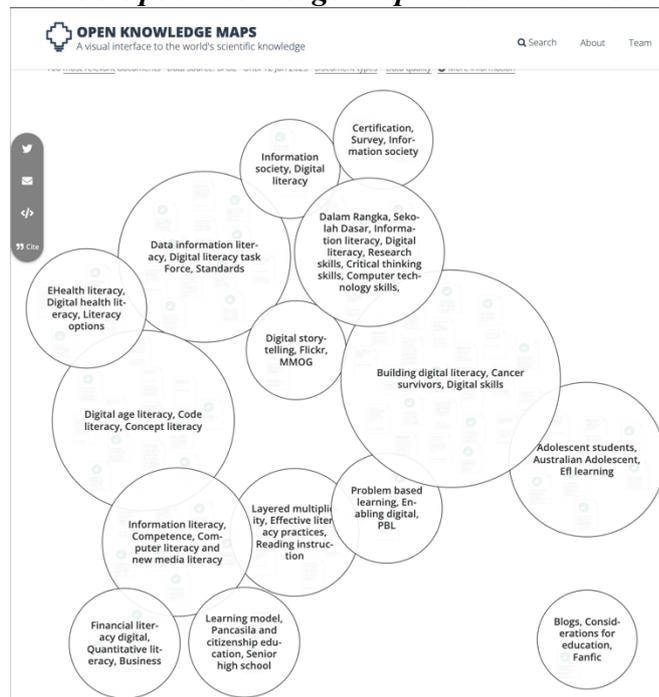
1.4.1 Manfaat/Signifikansi Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian dapat memperkaya pengembangan keilmuan pada dimensi kewarganegaraan dan meneguhkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *an integrated system of knowledge* (Hartoonian, 1992), *synthetic discipline* (Somantri, 2001), *interdisciplinary, multidimensional, scientific boundary line*, dan atau kajian konseptual sistemis (Sapriya, 2007; Winataputra & Budimansyah, 2007; Winataputra, 2012).

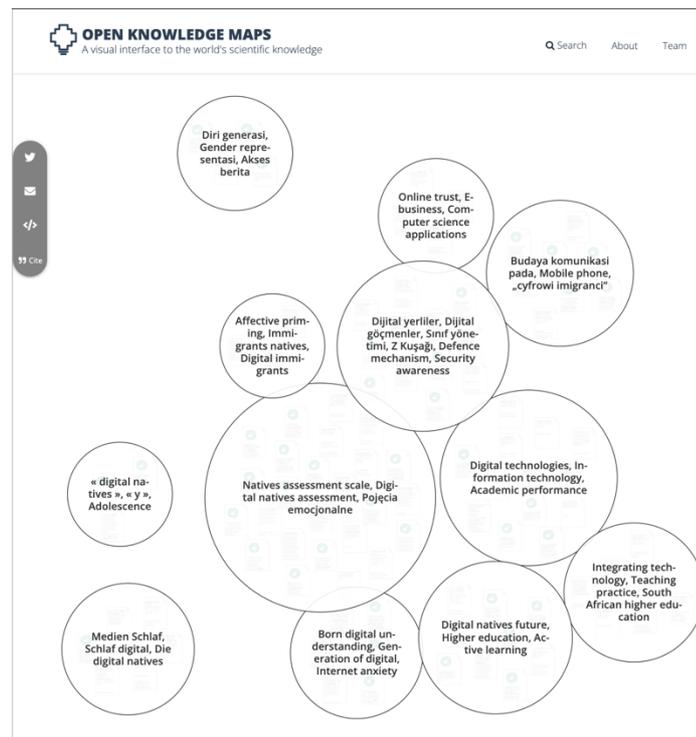
Civic engagement dapat mengisi kekosongan hubungan antara pemerintah dengan warga negara karena permasalahan yang timbul di masyarakat tidak mungkin dapat diselesaikan dengan hubungan vertikal saja, namun membutuhkan hubungan horizontal dengan sesama warga negara. Temuan tentang *civic engagement* sebagai jembatan hubungan antara negara (pemerintah) dengan warga negara dengan pola literasi digital bagi *digital natives*. Dengan demikian, secara akademik-teoretis dapat melahirkan formulasi baru kajian Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan yang meliputi *civic engagement* melalui literasi digital bagi *digital natives*. Berikut akan ditampilkan hasil analisis penelitian sebelumnya menggunakan *open knowledge map* dengan kata kunci “*civic engagement*, literasi digital dan *digital natives*” bahwa dalam penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji ketiga kata kunci dalam penelitian ini secara bersamaan.



Gambar 1.3 Analisis Open Knowledge Map Kata Kunci “Civic Engagement”



Gambar 1.4 Analisis Open Knowledge Map Kata Kunci “Literasi Digital”



Gambar 1. 5 Analisis *Open Knowledge Map* Kata Kunci “Digital Natives”

Dari hasil analisis *Open Knowledge Maps*, terlihat bahwa penelitian dengan judul “Penguatan *Civic Engagement* Melalui Literasi Digital Bagi *Digital Natives*” belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun kata kunci yang terkait seperti “*Civic Engagement*,” “*Literasi Digital*,” dan “*Digital Natives*” telah ada dalam basis pengetahuan, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji keterhubungan antara ketiga kata kunci tersebut. Dengan menjembatani kesenjangan penelitian yang ada, penelitian ini akan menghasilkan wawasan baru tentang bagaimana literasi digital dapat mempengaruhi partisipasi aktif dan kritis *digital natives* dalam konteks kewarganegaraan. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya mengembangkan keterampilan literasi digital sebagai bagian integral dari Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang terinformasi dan aktif di dunia digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan teoritis Pendidikan Kewarganegaraan dan juga

memberikan panduan praktis bagi para pendidik, penyusun kebijakan, dan praktisi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang relevan dan efektif untuk memperkuat *civic engagement* melalui literasi digital bagi *digital natives*.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi Kebijakan

Hasil penelitian penguatan *civic engagement* melalui literasi digital bagi *digital natives*. diharapkan menjadi salah satu faktor penguat bagi kebijakan tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih luas tidak hanya dalam lingkup persekolahan saja.

1.4.3 Manfaat/Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif sudut pandang atau solusi bagi pemerintah melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk mempertimbangkan literasi digital bagi *digital natives* yang berkembang di Indonesia saat ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan perumusan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.4 Manfaat/Signifikansi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memberikan pencerahan pengalaman hidup dengan memberikan gambaran dan mendukung adanya literasi digital untuk penguatan *civic engagement* bagi *digital natives* agar generasi muda Indonesia dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas terutama dalam penggunaan informasi di media sosial.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan disertasi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 yang terdiri dari lima bab sebagai berikut di bawah ini.

Bab I pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian mengenai pengguna internet di Indonesia, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur disertasi itu sendiri.

Bab II kajian teori. Bab ini membahas mengenai konsep dan teori yang mendukung yang digunakan dalam penelitian mulai dari teknologi dan perubahan sosial, media dan literasi *digital*, *digital natives*, serta *civic engagement*.

Bab III metode penelitian. Bab ini mengulas perihal metodologi yang digunakan dalam proses penelitian meliputi pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian, dan isu etik terkait penelitian.

Bab IV temuan dan pembahasan. Bab ini mengulas gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan terkait (1) Kemampuan *Digital Nativess* untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi konten informasi dalam media sosial sebagai penguatan *Civic Engagement*, (2) penguatan *civic engagement* melalui integrasi literasi informasi dan literasi data sebagai bagian dari literasi digital bagi *digital natives*, (3) penguatan *civic engagement* dalam perspektif utopia dan distopia tanpa literasi digital, dan (4) praktik kewarganegaraan digital dapat memperkuat *civic engagement* melalui literasi digital bagi *digital natives*.

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang ditawarkan.